

# KPU Bombana Rakor Persiapan Verfak Parpol

**Bombana, SultraNET.** | Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Persiapan Pelaksanaan Verifikasi Faktual (Verfak) Kepengurusan dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024, Rabu (12/10/2022).

Anggota KPU Kabupaten Bombana, Kasjumriati Kadir mengatakan dalam pelaksanaan Verfak Parpol yang direncanakan dimulai tanggal 16 Oktober 2022 mendatang, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan.

Koordinator Divisi Teknis KPU Bombana itu menjelaskan Parpol calon peserta Pemilu agar memastikan pengurus Parpol dapat ditemui baik secara langsung di Kantor Parpol maupun melalui media Teknologi informasi pada waktu Verfak Kepengurusan.

“Khusus bagi Ketua, Sekretaris dan Bendahara Parpol tingkat Kabupaten diwajibkan hadir dan dapat menunjukkan KTP-El dan Kartu tanda anggota Parpol saat dilakukan Verfak,” ujar Kasjumriati.

Parpol juga diharapkan dapat menghadirkan pengurus Kabupaten saat verifikasi dengan memperhatikan sebanyak 30 persen keterwakilan perempuan.

Selanjutnya Parpol memberikan akses bagi petugas verifikator KPU untuk melihat dan memastikan sarana dan prasarana Kantor Parpol.

Parpol juga mempersiapkan dokumen Bukti Status kepemilikan kantor dan keterangan domisili dari pemerintah setempat agar dapat ditunjukkan pada saat Verfak.

“Parpol harus memastikan petugas narahubung Parpol aktif berkomunikasi dengan help desk KPU Bombana,” tandasnya. **(IS)**

---

# PT. Tonia Mitra Sejahtera Diduga Cemari Laut, Penghasilan Nelayan Anjlok

**Bombana, SultraNET.** | Aktivitas PT. Tonia Mitra Sejahtera (TMS) pada Pelabuhan Khusus Jetty 2 di Wilayah Talabasi diduga menyebabkan tercemarnya air laut sehingga berdampak anjloknya penghasilan nelayan setempat yang menggantungkan hidupnya di perairan tersebut.

Sebagaimana diketahui PT. Tonia Mitra Sejahtera merupakan perusahaan pertambangan nikel yang beroperasi di Kecamatan Kabaena Timur dan Kabaena Tengah, Kabupaten Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara.

Kepada awak media ini, Selasa (11/10/2022) Kepala Desa Tapuhaka, Kecamatan Kabaena Timur, Hasrianto, S.Hut mengatakan pihaknya banyak menerima keluhan anjloknya penghasilan dari warganya yang berprofesi sebagai nelayan.

Para nelayan tersebut mengeluhkan berkurangnya penghasilan akibat harus mencari ikan di areal yang lebih jauh karena areal tangkap ikan mereka selama ini di areal Talabasi sudah tidak steril lagi hal itu terjadi sejak masuknya PT. TMS membangun Jetty 2.

“Sebelum perusahaan (PT.TMS.red) masuk, di Talabasi itu tempat nelayan mencari ikan, disana tempat mereka memancing karena masih steril sekarang sudah tidak steril otomatis penghasilan nelayan disitu berkurang,” ujar Hasrianto

Ia menyebut anjloknya penghasilan nelayan akibat aktivitas Perusahaan harus menjadi perhatian tidak hanya pemerintah Desa namun harus menjadi perhatian semua pihak termasuk Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

“Perusahaan juga tidak pernah melakukan sosialisasi di wilayah Kabaena Timur ini,” tegasnya.

Ia berharap pihak PT. TMS dapat memberikan perhatian kepada semua elemen terdampak khususnya para nelayan setempat yang telah nyata penghasilan mereka anjlok akibat aktivitas Perusahaan.

Ia menegaskan agar pihak PT. TMS tidak terpengaruh dengan polemik tapal batas antara Kecamatan Kabaena Timur dan Kabaena Tengah dan memberikan proporsi yang sama terhadap warga di kedua Kecamatan tempat perusahaan beraktivitas itu.

“Jangan sampai terjadi kita di peta konflik antara sesama warga Pribumi,” tandasnya.

Dikonfirmasi terpisah, Anggota DPRD Bombana asal Pulau Kabaena, Amiadin, SH mengaku sangat menyayangkan banyaknya keluhan warga kepadanya terkait aktivitas PT. TMS di Pulau Kabaena itu.

Ia menilai dengan banyaknya keluhan itu, justru Perusahaan menunjukkan sikap arogansi dan seolah tidak menghormati keberadaan Pemerintah serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai ujung tombak perwakilan suara rakyat.

Ia menyebut dengan tidak menghadiri beberapa kali undangan Pemerintah Kecamatan Kabaena Timur serta undangan DPRD Kabupaten Bombana beberapa waktu lalu merupakan gambaran perusahaan yang tidak menghargai Pemerintah dan Masyarakat.

“Perusahaan ini tidak menunjukkan ciri investasi yang baik, saya harap Pemerintah Kabupaten Bombana melakukan evaluasi terhadap perusahaan ini,” ujar Anggota DPRD 4 Periode itu.

Ia menambahkan dengan kondisi bahwa perusahaan yang diduga tidak menghargai Pemerintah Kabupaten, ia berharap kepada Ir H Burhanuddin Makku M.Si baik sebagai Pejabat Bupati Bombana maupun sebagai Ketua Perhimpinan Ahli Pertambangan Indonesia Perwakilan Sulawesi Tenggara (Sultra) untuk melakukan evaluasi sekaligus menjadikan PT. TMS sebagai pilot project investasi yang baik.

“Saya pikir untuk mewujudkan Bombana Sebagai SURGA INVESTASI bisa dimulai dengan menjadikan PT. TMS itu sebagai percontohan,” tandasnya.

Hingga berita ini dirilis, pihak PT. Tonia Mitra Sejahtera (TMS) Belum Terkonfirmasi. **(IS)**

---

# PJ. Bupati Bombana Buka Festival Tangkeno ke-10

**Bombana, SultraNET.** | Penjabat Bupati Bombana, H. Burhanuddin secara resmi membuka Festival Tangkeno ke-10 tahun 2022, di Desa Wisata Tangkeno, Kecamatan Kabaena Tengah, Kabupaten Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), Senin (10/10/2022).

Festival yang telah diadakan selama sepuluh tahun berturut turut itu mengangkat tema “Melestarikan Keberagaman Budaya, Mewujudkan Pariwisata Bangkit, Ekonomi Pulih Menuju Bombana Surga Investasi”.

Festival Tangkeno yang telah masuk kalender pariwisata nasional itu bakal dimeriahkan dengan kirab budaya, tari kolosal Lumense, pameran kuliner, kriya, kemah wisata dan pasar tradisional.

Saat menyampaikan sambutan Pj. Bupati H. Burhanuddin mengatakan pelaksanaan festival tangkeno merupakan komitmen pemerintah Kabupaten Bombana dalam membangun kepariwisataan dan mempromosikan objek wisata serta budaya yang ada di Bombana.

“Ini menjadi momentum kebangkitan industri dan pariwisata Bombana,” ujar H.Burhanuddin.

Ia menjelaskan Festival Tangkeno telah masuk dalam Kharisma Event Nusantara (KEN) tahun 2022. yang merupakan strategi kolaborasi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bersama pemerintah daerah dan seluruh stakeholder pariwisata.

“Tujuannya untuk menaikkan citra pariwisata Indonesia dan penggerak kebangkitan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif,” tandasnya

---

# Siswa SMKN 02 Bombana Bersihkan Pasar Tadoha Mapaccing

**Bombana, SultraNET.** | Siswa Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 02 Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara menggelar Bakti Sosial (Baksos) membersihkan sampah areal Pasar Sentral Tadoha Mapaccing, Minggu (9/10/2022).

Kepala SMKN 02 Bombana, Amrun mengatakan Bakti Sosial yang dilaksanakan itu merupakan wujud dukungan terhadap pemerintah Daerah dibawah kepemimpinan PJ. Bupati Burhanuddin untuk mewujudkan Ibu Kota Bombana yang Bersih.

Kegiatan yang di ikuti ratusan pelajar dan guru tersebut juga merupakan rangkaian memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) SMKN 02 Bombana yang ke 16 Tahun.



Apel sebelum pelaksanaan Baksos

“Kegiatan ini juga untuk memberikan contoh kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga kebersihan lingkungan sekitar,” ujar Amrun saat memberikan pengarahan pada para siswanya.

Ia menjelaskan niat baik pemerintah daerah untuk mewujudkan Ibu Kota Bombana yang bersih perlu mendapat dukungan dari semua pihak termasuk pihak sekolah.

“Ini bentuk dukungan kita terhadap kebijakan pemerintah,” tandasnya.

Pantauan awak media ini, usai mendengarkan pengarahan, ratusan Siswa dengan di koordinir oleh para guru langsung memunguti sampah kering di hampir seluruh bagian pasar. (IS)

---

# Turnamen Sepak Bola meriahkan HUT ke-7 Polsek Lantari Jaya Bombana

**Sultranet.com, Rumbia** - Kepolisian Sektor (Polsek) Lantari Jaya Kabupaten Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara menggelar open turnamen sepak bola dalam rangka memeriahkan Hari Ulang Tahun (HUT) Polsek Lantari Jaya yang ke-7 tahun.

Kegiatan itu mengangkat Tema “Mempererat Tali Persaudaraan dan Menjunjung Tinggi Sportifitas guna Terciptanya Situasi Kamtibmas yang Kondusif”.

Turnamen yang diselenggarakan di Lapangan Sepak Bola Surya Bakti Desa Lombakasih Kecamatan Lantari Jaya ini melibatkan 16 klub sepak bola yang ada di Bombana.

Ke 16 klub tersebut akan bertanding memperebutkan hadiah uang tunai dengan total hadiah keseluruhannya sebesar 20 juta rupiah.

Turnamen sepak bola yang dibuka langsung oleh Kapolsek Lantari Jaya Iptu Ridlo MSB S.Tr.K.,M.H mendapatkan dukungan penuh dari masyarakat, ini terlihat antusias masyarakat yang menonton sangat ramai pada saat kegiatan pembukaan digelar.

Iptu Ridlo MSB S.Tr.K.,M.H menjelaskan selain untuk memeriahkan hari jadi Polsek Lantari Jaya yang ke-7, kegiatan tersebut juga merupakan rangkaian dari kegiatan Hari Kesaktian Pancasila.

“Dengan Kegiatan ini kita bisa melihat potensi potensi pemuda berbakat di bidang Sepak bola yang ada di Kabupaten Bombana khususnya di Kecamatan Lantari Jaya dan Rarowatu Utara,” ujarnya Rabu (05/10/2022).

Sesaat sebelum pertandingan pembuka, terlihat jajaran Polsek Lantari Jaya dan peserta turnamen menggelar doa bersama untuk solidaritas korban tragedi Kanjuruhan.

“Kita berdoa bersama semoga sepakbola Indonesia tidak ada lagi tragedi yang

terjadi dan semoga para korban tragedi Kanjuruhan bisa diterima arwahnya sisi Allah S.W.T,” tutur Kapolsek penghoby game Mobile Legend ini.

Lebih Lanjut Ridlo selaku pimpinan di Polsek Lantari Jaya menaruh harapan yang besar kepada seluruh personil Polsek Lantari Jaya untuk untuk selalu menjadi Garda terdepan dalam melayani masyarakat.

“Harapan saya Polsek Lantari Jaya dapat semakin jaya, semakin bisa mengayomi dan melayani masyarakat agar kedepanya keakraban Polsek Lantari Jaya dan Masyarakat tetap terjaga,” Pungkasnya.

---

## **PT. Jhonlin Batu Mandiri Dinilai Lecehkan Pemkab Bombana**

**Bombana, SultraNET.** | Pernyataan Direktur PT. Jhonlin Batu Mandiri (JBM), Kusdi Sastro, Kamis, 29 September 2022 melalui Karyasultra.id yang mengatakan bahwa Kepala Dinas TenagaKerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Bombana perlu belajar lagi menghitung dinilai melecehkan Pemerintah Kabupaten Bombana.

Kepada awak media ini, Ketua Umum Lembaga Swadaya Masyarakat Pergerakan Rakyat Indonesia Berdaulat dan Mandiri (LSM-Pribumi) Ansar Achmad mengatakan Pernyataan Direktur PT. JBM itu tidak layak dilontarkan seorang Direktur Perusahaan kepada Pemerintah.

Ia menilai pernyataan tersebut sebagai bentuk arogansi dan kekanak-kanakan serta ketidakpatuhan perusahaan terhadap pemerintah.

Terlebih apa yang disampaikan Kepala Disnakertrans Bombana itu merupakan data valid yang dimiliki oleh Dinas bersangkutan.

“Dengan pernyataan itu seolah PT. JBM sudah merasa lebih besar dari Pemerintah Kabupaten Bombana,” ujar Ansar Achmad, Senin (4/10/2022).

Untuk itu Ansar Achmad meminta Pemerintah Kabupaten Bombana untuk tidak diam terhadap pernyataan Direktur PT. JBM serta melakukan evaluasi menyeluruh terhadap investasi PT. JBM di Bombana tidak hanya dari aspek ketenagakerjaan saja.

Pernyataan bahwa 99 (sembilan puluh sembilan) persen Tenaga Kerja PT. JBM merupakan tenaga kerja lokal atau Pribumi merupakan pernyataan yang perlu di verifikasi kebenarannya.

“Data yang dilaporkan ke Pemerintah cuma satu orang saja, pertanyaannya yang lain bagaimana ini belum terkait kesejahteraan dan jaminan sosial mereka,” tegas Ansar Achmad

Ia menambahkan Data tenaga kerja menjadi penting diketahui pemerintah hal itu untuk memastikan hak hak tenaga kerja dapat terlindungi.

“PT. JBM jangan main-main dengan Data Ketenagakerjaan karena itu menyangkut hajat hidup orang,” tandasnya.

Hingga berita ini dirilis Direktur PT. JBM belum terkonfirmasi. (IS)

---

## Warga TWI Bantu Bersihkan Ibu Kota Bombana

**Bombana, SultraNET.** | Paguyuban Seni Beladiri Pernapasan Tapak Wali Indonesia (TWI) Kabupaten Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara menggelar Bakti Sosial membersihkan sampah area Kantor Bupati Bombana, Minggu (2/10/2022).

Salah satu Warga TWI Bombana, Sultan mengatakan kegiatan sosial warga TWI merupakan wujud dukungan terhadap Pemerintah Kabupaten dibawah kepemimpinan H. Burhanuddin sebagai Pejabat Bupati yang dinilai berkomitmen

menjadikan Ibu Kota Bombana menjadi bersih.

“Ini bentuk dukungan terhadap Program PJ. Bupati untuk memperindah dan menjadikan Ibu Kota Bombana bersih,” ujar Sultan.

Wujud dukungan tersebut lanjut Sultan dilakukan dengan menurunkan puluhan warga TWI seputar Ibu Kota Bombana bergotong royong membersihkan areal Kantor Bupati Bombana dan Sekitarnya.

“Semoga apa yang dilakukan warga TWI (Tapak Wali Indonesia) ini bisa menjadi salah satu kontribusi yewujudnya ibu kota Bombana yang bersih,” tandasnya.  
**(IS)**

---

# **IPTU Muhammad Safri Didaulat Pimpin Keluarga Pinrang Bombana**

**SultraNET., Rumbia** | Kerukunan Keluarga Pinrang (KKP) Kabupaten Bombana menggelar Musyawarah Besar I, bertempat di Hotel Istana, Rumbia Tengah, Sabtu (1/10/2022).

Musyawarah yang dihadiri puluhan warga Bombana asal Kabupaten Pinrang itu mendaulat Inspektur Polisi Satu (IPTU) Muhammad Safri, SE.,SH.,MH. Sebagai Ketua untuk kepengurusan periode 2022-2026.

Peserta yang merupakan keluarga Pinrang datang dari berbagai pelosok Kecamatan yang tersebar di Bombana.

Ketua Panitia Mubes, Kandamang mengatakan, forum Mubes merupakan sarana silaturahmi antara keluarga asal Pinrang yang ada di Kabupaten Bombana.

“Kita harapkan dengan terjalinnya silaturahmi maka kita akan saling menopang satu sama lain,” ujar Kandamang.

Ketua PGRI Bombana itu menyebut ajang silaturahmi sangat penting terkoordinasi dalam satu wadah kekeluargaan agar koordinasi dan konsolidasi keluarga lebih efisien.

“Terutama jika ada acara pernikahan atau jika ada berita duka maka informasi dan konsolidasi keluarga lebih efektif dan efisien,” bebernya.



Peserta Musda KKP

Sementara itu, Sekretaris KKP terpilih, Asri mengatakan usai pelaksanaan Mubes, konsolidasi akan segera dilakukan dalam rangka pengukuhan pengurus.

“Kami akan menghadirkan BPW KKP Sultra pada acara Pelantikan nantinya.”  
Singkat Asri. **(hrd)**

---

## Sukseskan Program Bangga Kencana, Kodim 1413/Buton Buka

# Layanan KB gratis di Bombana

Rumbia, SultraNET. - Kodim 1413/Buton menggelar pelayanan KB gratis Kabupaten Bombana selain itu kegiatan serupa dilaksanakan serentak di beberapa tempat yaitu di Kota Baubau, Kabupaten Buton Selatan dan Kabupaten Wakatobi, Jumat (30/9/2022).

Dandim 1413/Buton Letkol ARM Muhammad Faozan melalui Pasi Ter, Kapten Inf Harlino Ulo menjelaskan, pelayanan KB gratis ini digelar dalam rangka memperingati HUT TNI tahun 2022. Selain itu, Kodim Buton juga memperingati hari TNI Manunggal Bangsa Kencana Kesehatan, TNI Manunggal Bangsa Kencana Kesehatan Terpadu, dan Hari Kontrasepsi sedunia.

Pelayanan KB di Kota Baubau berlokasi di Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Wangkanapi, Kecamatan Wolio. Sedikitnya 80 masyarakat mengikuti agenda KB ini, di Kabupaten Buton Selatan kegiatan dilaksanakan di Puskesmas Batauga, Kelurahan Laompo, Kecamatan Batauga. Sedikitnya 21 masyarakat mengikuti agenda Ini

Sementara pelayanan KB di Kabupaten Bombana berlokasi di Puskesmas Poleang Tengah, Kecamatan Poleang Tengah. Sedikitnya 24 warga mengikuti agenda ini. Sedangkan di Kabupaten Wakatobi berlokasi di Puskesmas Wangi-wangi, Kecamatan Wangi-wangi. Sedikitnya 53 warga berpartisipasi pada pelayanan KB ini.

Kegiatan ini dilakukan serentak di seluruh Negara Kesatuan Republik Indonesia, selama tanggal 1 Agustus sampai 30 September 2022. Dan bertujuan untuk meningkatkan kesertaan ber-KB di wilayah kerja dan menjaga keberlangsungan pemakaian kontrasepsi.

“Saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah bekerja sama saling bahu membahu demi terselenggaranya acara ini. Semoga, acara ini selalu memberikan manfaat bagi masyarakat di Kabupaten Bombana” Ucap singkat kadis DPPKB Bombana, Abd.Azis saat di hubungi awak media

Sebagai informasi, pelaksanaan TNI Manunggal - Keluarga Berencana - Kesehatan (TMKK) Untuk keseluruhan target 2.081 akseptor dan capaiannya 5.334 akseptor atau 256% dengan rincian IUD 160, MOP 3, MOW 8, Implan 300,

Suntik 1.310, Kondom 42 dan Pil 1.455. Untuk pelayanan KB gratis kali ini, dilakukan untuk semua jenis pelayanan KB Umum termasuk vasektomi atau KB untuk pria. (Adv)

---

# Rekomendasi DPRD Bombana Terkait Polemik Tapal Batas Disoal

**Bombana, SultraNET.** | Kesimpulan Rapat Dengar Pendapat (RDP) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bombana yang bakal dituangkan dalam Rekomendasi DPRD terkait penentuan batas Wilayah Kecamatan Kabaena Timur dan Kabaena Tengah, Kabupaten Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara, yang dibacakan Ketua DPRD Bombana Arsyad, Rabu (28/9/2022) mendapat sorotan dari berbagai elemen masyarakat pulau Kabaena.

Kepada awak media ini, Kamis (29/9/2022) Salah satu Warga Pulau Kabaena, Amsir yang mendatangi langsung Kantor DPRD Bombana untuk mempertanyakan kesimpulan rapat RDP yang ia nilai berpotensi melanggar tata tertib DPRD serta berpotensi menimbulkan perpecahan di kalangan masyarakat kedua wilayah.

Potensi melanggar tata tertib DPRD kata Amsir lantaran antara permintaan RDP oleh pemohon dalam hal ini Pihak Kecamatan Kabaena Timur tidak sesuai dengan poin pembahasan pada saat dilakukan RDP.

Ia menyebut keinginan masyarakat dan Pemerintah Kecamatan Kabaena Timur agar DPRD mempertemukan dalam RDP Pihak PT. Tonia Mitra Sejahtera (TMS) dan masyarakat Kabaena Timur untuk meminta kejelasan mengapa tidak pernah dilakukan sosialisasi mengenai dampak lingkungan, sosial dan ekonomi terhadap masyarakat Kabaena Timur kendati Pihak Kecamatan sudah melayangkan Surat ke PT. TMS untuk melakukan sosialisasi namun tidak diindahkan.

Parahnya lagi masyarakat Kabaena Timur saat ini sudah merasakan dampak

negatif kehadiran PT. TMS dengan rusaknya sumber air bersih warga Desa Balo bahkan ancaman kekeringan air bersih sudah di depan mata, namun oleh DPRD agenda berubah menjadi agenda penentuan tapal batas wilayah kedua Kecamatan.

Padahal lanjut Amsir terkait tapal batas Kecamatan, saat ini Tim bentukan Pemerintah Daerah juga sudah pada tahap finalisasi kerja sehingga produk pekerjaan belum dituangkan dalam produk hukum, oleh DPRD kemudian direkomendasikan untuk dilakukan pembatalan.

“Ada apa dengan lembaga kita ini, yang seharusnya perusahaannya yang diberi warning malah yang dilakukan adalah rekomendasi pembatalan rumusan tapal batas, saya hadir di sini (DPRD.red) untuk meminta klarifikasi,” ujar Amsir

Pada kesempatan itu ia meminta Badan Kehormatan DPRD Bombana jika dalam RDP tersebut ada pelanggaran terhadap tata tertib persidangan di DPRD maka lembaga DPRD harus bertanggung jawab dengan meminta maaf kepada masyarakat.

“Harus begitu dong kita mengatur negara ini, jangan “sekonyong-konyong” ada yang datang tolong dihentikan ini, tolong dirubah itu, itu tidak boleh harus didengarkan aspirasi yang lain,” beber Amsir

Mantan Anggota DPRD Bombana dapil Kabaena itu menjelaskan seharusnya jika pihak perusahaan PT. TMS tidak hadir maka seharusnya RDP di pending dulu untuk menunggu pihak perusahaan, lalu konfirmasi alasan ketidak hadirannya mereka bahkan bisa dilakukan upaya paksa.

“Tapi kemudian ini dialihkan kepada persoalan tapal batas, ingat tapal batas itu persoalan hajat hidup orang banyak, kita berharap Pemerintah Daerah tegas dengan tetap menuntaskan kinerja tim yang telah dibentuk dan jika ini ada pelanggaran tata tertib maka Ketua DPRD harus berani mundur dari Jabatan,” tegasnya.

Ia menambahkan, seharusnya atas ketidak hadirannya Pihak PT. TMS, DPRD dapat merekomendasikan untuk dilakukan penghentian aktivitas hingga ditemukan solusi dan kepastian terhadap masyarakat Kabaena Timur.

“Jika keputusan kita terpengaruh dengan desakan massa ini tidak benar, saya

juga berpotensi membawa massa lebih besar jika seperti ini, jangan begini kita kelola negara,” tandasnya

Hal senada disampaikan Lembaga Pemerhati, Pemberdayaan Budaya Sosial dan Lingkungan Hidup Kabaena (LPP-BASOKA) melalui Ketuanya Eldiyatri Sultansyah mengaku sangat menyayangkan ketidak hadiran pihak PT. TMS saat RDP.

Menurutnya kehadiran PT. TMS sangat penting karena untuk memberikan klarifikasi terkait pelaksanaan sosialisasi AMDAL di wilayah Kecamatan Kabaena Timur.

Ia menyebut, berdasarkan surat yang diajukan Pemerintah Kecamatan Kabaena Timur ke DPRD untuk di fasilitasi RDP agar PT. TMS di undang namun kenyataannya PT. TMS tidak hadir dalam RDP Tersebut.

Terkait penjelasan hasil penegasan yang disampaikan Kabag Otda, Kabag Hukum, Kabag Tapem dan Asisten 1 Setda Bombana pada saat RDP di DPRD pihaknya mengaku mendengarkan secara langsung langkah-langkah yang dilakukan dalam penyelesaian penetapan dan penegasan wilayah administrasi Kecamatan Kabaena Timur dan Kabaena Tengah tersebut telah sesuai dengan Permendagri no. 45 tahun 2016 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa.

“Seharusnya kita sebagai warga negara yang baik harus koperatif oleh Pemerintah dan mengapresiasi tahapan-tahapan yang telah dilaksanakan oleh Pemda Bombana dalam penyelesaian penetapan dan penegasan wilayah administrasi Kecamatan Kabaena Timur dan Kabaena Tengah.

“Ini tinggal di perkuat dengan Peraturan Bupati, jadi kami berharap Pemkab Bombana harus tegas dan cepat menyelesaikan polemik ini, agar mencegah polemik secara berkepanjangan,” singkatnya.

Dikonfirmasi terpisah, Wakil Ketua DPRD Bombana dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Iskandar membantah adanya rekomendasi pembatalan hasil kerja tim bentukan Pemerintah Kabupaten terkait tapal batas wilayah.

Anggota DPRD Dapil Kabaena itu menyebut belum ada produk hukum kendati telah berulang kali dilakukan RDP terkait tapal beberapa wilayah yang ada di Kabupaten Bombana.

Ia menjelaskan beberapa desa bermasalah terkait tapal batas karena faktanya

batas desa yang ada di seluruh wilayah Bombana itu hanya batas desa yang merupakan persyaratan pemekaran desa belum pernah disempurnakan, karena syarat desa itu hanya ada kordinat batas dan rata rata melakukan pengukuran hanya untuk memenuhi persyaratan administrasi pemekaran saja.

“Terkait perbatasan dua Kecamatan ini, karena ini tensinya tinggi kita berharap pemerintah daerah memberikan atensi khusus dan kami pikir itu sudah selesai ternyata belum,” ujar Iskandar

Mantan Anggota KPU Bombana itu mengatakan saat RDP narasumber yang terdiri dari anggota Tim dari Pemerintah Kabupaten juga terjadi perbedaan penjelasan, ada yang mengatakan sudah selesai dilakukan pemetaan ada pula yang mengatakan sudah dilakukan pemetaan namun belum di perbupkan (Peraturan Bupati) berarti belum menjadi produk hukum.

“Kemudian Peta yang ditampilkan saat RDP ada beberapa yang tidak pas dengan kondisi lapangan, kenapa ini terjadi ada juga dari mereka yang membantah bahwa memang kami turun namun tidak melakukan pengukuran alasannya karena tidak aman dan melakukan pengukuran di laut,” beber Iskandar.

Persoalan tapal batas itu, juga temukan wilayah yang desanya tidak jelas sehingga Peta harus disempurnakan, ia menilai kerja tim belum sempurna dan tidak bisa dipertanggungjawabkan, karena dari keterangan tim ada tahapan-tahapan yang belum dilalui.

“Jadi tidak ada Rekomendasi Pembatalan karena ini belum menjadi produk hukum yang ada adalah perbaikan atau penyempurnaan karena mereka sendiri tidak meyakini rancangan tapal batas sebagai kebenaran sejatinya,” ucapnya.

Terhadap PT. Tonia Mitra Sejahtera Iskandar berharap kehadiran perusahaan tersebut di dua wilayah Kecamatan Kabaena Timur dan Kabaena Tengah dapat mengakomodir kepentingan semua pihak.

“Perusahaan juga harus memposisikan masyarakat bukan soal tapal batas, harusnya bukan persoalan soal Kabaena Tengah atau Timur tetapi ini adalah Kabaena Tengah dan Kabaena Timur,” jelasnya

Kendati demikian terkait soal hak hak komunal seperti hak ulayat atau apapun yang ada wilayah kerja perusahaan, ia berharap dimanapun orangnya berada

harus di akui jika ditarik lurus misalnya batas administrasinya yang di klaim keluarga Desa Lengora itu ada di Wilayah Kabaena Timur maka hak komunal mereka harus diakui oleh perusahaan dan saudara saudara dari Kecamatan Kabaena Timur juga harus mengakui itu sepanjang itu diakui dan terekam dalam jejak sejarah dan riwayat asal usul begitupun sebaliknya.

“Itu tanggung jawab perusahaan karena faktanya PT. TMS berada di dua wilayah Kecamatan jadi adalah tanggung jawab perusahaan di dua wilayah itu yang menyangkut perlindungan sosial dan lingkungannya itu tidak bisa ditawar tawar lagi,” tutupnya (Idris Hayang)